



MENROPONG KRISIS NEGARA INDONESIA DENGAN TELESKOP NEGARA IDEAL PLATO

Yohanes Jehuru

Abstract: Just as political justice consists in the structural relations among classes of society, Plato believes that individual justice consists in correct structural relations among parts of the soul. Paralleling the producers, warriors, and rulers in the city, Plato claims that each individual soul has three separate seats of desire and motivation: the appetitive part of our soul goes after food, drink, sex, and so on (and after money most of all, since money is the means of satisfying the rest of these desires); the spirited part of the soul yearns for honor; the rational part of the soul looks for truth and knowledge. In a just soul, these three parts stand in the correct power relations. The rational part must rule, the spirited part must enforce the rational part's convictions, and the appetitive part must obey them. In the just soul, the desire of the rational, truth-loving part dictate the overall aims of the human being. All appetites and considerations of honor are put at the disposal of truth-loving goals. The just soul strives entirely toward truth. Plato identifies the philosopher (literally "truth lover") as the most just individual, and sets him up as ruler of the just city. Plato's purposes of the state shows that there is an essential relationship between the three segments of society; authorities, military and producer. The ruler must consist of people who have the knowledge and wisdom and the leader is a philosopher. This article will work on describing Plato's idea of the state and put it as a telescope for observing the recent crisis in Indonesian society.

Keywords: Negara ideal • krisis negara • bentuk negara • pengetahuan moral, rasional • humanis • keadilan dan kebijaksanaan • filsuf •



Pengantar

Artikel ini saya beri judul “*Meneropong Krisis Negara Indonesia dengan Teleskop Negara Ideal Plato*”. Teleskop negara ideal Plato (428 S.M-347 S.M) adalah alat untuk meneropong sumber-sumber krisis di Indonesia. Negara ideal bagi Plato bertujuan untuk memanusiaakan manusia. Di dalam tujuan ini manusia ditempatkan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Mengingat bahwa dalam kehidupan seseorang membutuhkan kehadiran orang lain untuk melengkapi kebutuhannya, maka persekutuan hidup bersama, *koinonia*, diperlukan. Persekutuan, bagi Plato, merupakan dasar terbentuknya suatu negara. Model persekutuan merupakan pijakan Plato untuk menentukan bentuk negara yang dibangunnya, pemimpin negara, pembagian kekuasaan dalam negara, hukum dan kaderisasi penerus bangsa melalui pendidikan yang memadai (Kraut, 1992: 232-233).

Tujuan hidup Plato dapat dilihat dari obsesinya tentang wujud sebuah negara yang teratur serta mencakup di dalamnya masyarakat yang berpendidikan. Pandangan negara ideal ini dicetuskan oleh Plato setelah melihat sistem pemerintahan Athena di zamannya yang kurang stabil, yakni berganti-gantinya sistem aristokrasi, oligarki maupun demokrasi yang cenderung kurang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Menurut Plato, sistem pemerintahan haruslah didasari oleh Idea yang tertinggi yaitu Idea Kebaikan. Kemauan untuk melaksanakan itu tergantung pada budi. Tujuan pemerintahan yang benar ialah mendidik warga negara mempunyai budi yang hanya bersumber dari pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sangat penting dia dalam suatu negara. Pemimpin yang bisa menjamin tujuan ini adalah filsuf. Plato menyatakan bahwa ‘kesengsaraan dunia tidak akan berakhir, sebelum filsuf menjadi seorang pemimpin. Kita, kata Plato, tidak dapat mengharapkan negara baik apabila orang-orang yang berkuasa tidak berperilaku baik dan bijaksana.

Guna mewujudkan negara ideal, Plato membagi struktur sosial sebuah negara menjadi tiga bagian. Pertama, kelompok filsuf yang diberi amanah untuk memerintah, karena mereka mempunyai pengertian tentang “yang baik” sehingga akan lebih arif dalam memimpin negara. Kedua, adalah golongan prajurit, sebagai penjaga keamanan negara yang mengawasi warga negara agar selalu tunduk pada filsuf. Mereka hidup dalam asrama-asrama dan menunggu perintah dari negara untuk tugas tersebut di atas. Ketiga, golongan rakyat biasa yakni para petani, tukang yang menopang kehidupan ekonomi rakyat.



Dalam *Republic*, Plato menyatakan bahwa tujuan sebuah kekuasaan adalah menciptakan suatu rezim yang stabil, yang disinari oleh kebenaran dan ilmu pengetahuan, maka penguasa yang ideal adalah filsuf. Negara khayalan atau idaman (utopia) sebagaimana yang diangankan Plato tersebut sebagai negara dengan sistem politik sipil utopis atau politik sipil. Hal ini untuk membedakan dengan konsep atau teori negara yang berdasarkan politik rasional dan bijaksana.

Plato menganalogikan negara dengan manusia yang mempunyai tiga kemampuan jiwa yakni: kehendak, akal pikiran dan perasaan: di mana ketiga hal ini disamakan dengan tiga struktur sosial di atas (golongan filsuf, prajurit dan rakyat biasa). Plato bukanlah pendukung demokrasi, tetapi sebaliknya sangat kritis terhadap demokrasi. Menurut pengamatan Plato praktek demokrasi di Athena menunjukkan suatu bentuk sistem politik yang berbahaya dan tidak praktis. Plato mendambakan suatu aristokrasi yang dipimpin oleh filsuf karena punya kelebihan, keutamaan dan pandangan jauh ke depan.

Tujuan Pembentukan Negara

Pemikiran Plato tidak terlepas dari konteks sejarah negara Athena, yang pada masa itu dilanda krisis kepemimpinan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tidak mengenal pengetahuan yang sebenarnya (*akrasia*). Mereka adalah pemimpin tirani atau diktator yang memerintah secara immoral. Mereka menelan rakyatnya dengan cara memuaskan nafsu dan keinginan mereka sendiri. Meskipun mereka berada di puncak kekuasaan, sesungguhnya mereka telah menjadi mangsa dari segala nafsu dan keinginan mereka sendiri. Keadaan mereka semakin lama semakin menyedihkan karena mereka tak pernah puas dalam memenuhi tuntutan nafsu dan keinginan mereka yang tiada henti. Mereka hidup dengan penuh kekhawatiran, kecurigaan, dan ketakutan, sehingga akhirnya mereka tidak dapat mempercayai siapa pun. Mereka takut terhadap pembantu mereka sendiri. Mereka mencurigai semua orang yang berada di sekitarnya. Mereka tidak dapat makan dan minum dengan tenang karena takut diracuni. Mereka tidak dapat tidur pulas karena takut dibunuh secara tiba-tiba. Karena mereka tidak dapat bergerak dengan leluasa, lalu mereka berupaya membatasi keleluasaan gerak semua orang. Mereka bertindak sewenang-wenang dengan dalih demi keamanan dan kepentingan umum, padahal sebenarnya, demi keamanan dan kepentingan mereka sendiri (Rapar, 1991: 88).



Pemikiran Plato tentang negara bersifat personal. Negara dipersonifikasikan dengan seorang individu atau sebaliknya manusia dipersonifikasikan sebagai sebuah negara. Plato bertitik tolak dari kondisi internal manusia yang harmonis dan adil. Ia menggambarkan suatu jiwa yang harmonis dan adil yang merupakan bagian-bagian dari jiwa yang ada pada manusia. Plato menghubungkan ketiga bagian jiwa itu dengan empat kebajikan pokok yang juga disebut sebagai moralitas jiwa atau keutamaan. Keempat kebajikan pokok itu ialah pengendalian diri (*temperance*), keberkasaan (*fortitude*), kebijaksanaan atau kearifan (*prudence*), dan keadilan (*justice*). Pikiran atau akal (*logos:nous*) dihubungkan dengan kebijaksanaan atau kearifan. Semangat atau keberanian (*thumos*) dihubungkan dengan keberkasaan, sedangkan keinginan, nafsu atau kebutuhan (*epithumia*) dihubungkan dengan pengendalian diri. Ada pun ketiga bagian jiwa itu secara keseluruhan dihubungkan dengan keadilan untuk memelihara keselarasan dan keseimbangan antara masing-masing bagian jiwa tersebut. Kesejajaran pembagian jiwa manusia dan kelas-kelas dari negara ideal Plato harus dihubungkan dengan keempat kebajikan pokok itu. Kebijaksanaan dan kearifan menjadi kebajikan pokok bagi kelas penasihat atau pembimbing yang terdiri dari para cendekiawan atau para filsuf. Keberkasaan menjadi moralitas jiwa bagi para pembantu yaitu militer. Sedangkan pengendalian diri menjadi keutamaan bagi semua orang dalam kelas penghasil dan yang terakhir yang harus menjadi kebajikan pokok, moralitas jiwa atau keutamaan bagi seluruh kelas dalam negara ialah keadilan. Hanya keadilanlah yang memungkinkan keselarasan dan keseimbangan antara masing-masing kelas dalam negara itu dapat terpelihara dengan baik (Lih. Rapar, 1991:75-79).

Untuk menemukan karakter dan sifat dasar keadilan dalam negara, pertama-tama Plato menunjuk kepada asal-mula terbentuknya negara yang dibahasnya secara analitikal ekonomis dan bukan secara historis. Plato mulai dengan melihat keinginan dan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka-ragam dalam kehidupannya sehari-hari. Fakta bahwa manusia tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang begitu banyak dan beraneka-ragam dengan kemampuan dan keterampilannya sendiri. Demi kepentingannya, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sadar akan hal itu, mereka kemudian sepakat untuk bekerja sama sesuai bakat, kemampuan, dan keterampilan masing-masing di suatu tempat yang didiami bersama yang kemudian disebut negara. Jadi negara lahir oleh karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka-ragam seperti makanan, perumahan dan pakaian. Untuk memenuhi segala



keinginan dan kebutuhan itu diperlukan petani, ahli bangunan, penenun, dan kemudian dapat ditambah dengan tukang sepatu, tukang kayu, tukang besi, dan lain sebagainya. Dalam negara ideal, pembagian kerja perlu diatur sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan masing-masing warganya.

Bagi Plato, pembagian kerja yang diatur sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap warga negara itulah yang disebut keadilan. Tentu saja pembagian kerja itu tidak hanya berlaku bagi salah-satu kelas dalam negara melainkan juga berlaku bagi ketiga kelas sehingga setiap kelas dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Bila semua orang dari semua kelas dalam negara dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka kebutuhan dan keinginan manusia yang banyak dan beraneka-ragam itu akan terpenuhi, negara pun makmur dan kesatuan serta keutuhan negara terpelihara dengan sebaik-baiknya (Rapar, 1991: 83-84).

Negara sebagai bentuk persekutuan hidup yang paling tinggi, memiliki tujuan yang juga paling tinggi, paling mulia dan paling luhur bila dibandingkan dengan tujuan yang dimiliki oleh persekutuan hidup lainnya. Seperti telah diungkapkan bahwa negara merupakan suatu bentuk persekutuan hidup, menempati jenjang yang paling tinggi karena ia memiliki tujuan yang paling tinggi, paling mulia dan paling luhur.

Bagi Plato, kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dengan demikian akan timbul rasa kolektivisme atau rasa kebersamaan daripada sifat individualisme. Plato merupakan filsuf pertama, dan dalam jangka waktu lama nyatanya memang cuma dia, yang mengusulkan persamaan kesempatan tanpa memandang kelamin. Mengenai kehidupan sosial, Plato mengemukakan semacam komunisme yang melarang adanya hak milik dan kehidupan berkeluarga. Menurutnya, adanya hak milik akan mengurangi dedikasi dan loyalitas seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Namun, “komunisme” ala Plato ini hanya terbatas pada kelas penguasa dan pembantu penguasa saja, sedangkan kelas pekerja diperbolehkan memiliki hak milik pribadi dan berkeluarga, karena merekalah yang menghidupi kelas lainya, dan tugas mereka adalah untuk menyelenggarakan produksi perekonomian.

Plato bersandar pada prinsip tanpa hak milik, baik dalam bentuk harta, keluarga maupun anak. Argumentasinya adalah bahwa hal-hal ini menghindarkan negara dari berbagai pengaruh *erosive* negara kota dan destruktif yang pada akhirnya menciptakan disintegrasi negara kota. Kecemburuan, kesenjangan sosial, dan tiap orang yang berusaha menumpuk

kekayaan serta milik pribadi dapat menimbulkan kompetisi bebas serta institusionalisasi. Jadi hal yang penting dalam negara adalah hak milik bersama. Sebagai contoh adalah hak kepemilikan atas anak, seorang ibu tidak bisa memiliki anak kandungnya karena anak tersebut dipelihara oleh negara, dan sang anak tidak boleh tahu siapa ayah dan ibunya.

Negara ada dan terbentuk bukan untuk negara itu sendiri melainkan untuk manusia yang menjadi warganya. Apa yang dimaksudkan dengan warga adalah warga sebagai suatu keseluruhan dan bukan sebagai pribadi. Oleh sebab itu, negara adalah suatu persekutuan hidup yang berada di jenjang yang paling tinggi dan paling berdaulat. Hal itu berbeda dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Epicurus (342-270 SM) yang mengatakan bahwa tujuan negara yang paling utama ialah untuk memenuhi kepentingan perorangan dengan jalan menyenangkan masing-masing pribadi warga negara, meskipun kesenangan individual yang dimaksudkan oleh Epicurus bukanlah semata-mata kesenangan materialistis dan biologis, melainkan yang paling utama ialah kesenangan jiwani dan rohani.

Tujuan negara yang paling tinggi adalah memperoleh kebaikan yang tertinggi bagi manusia dan bukan sekedar kebaikan semata-mata. Itu berarti negara harus senantiasa mengupayakan serta menjamin adanya kebaikan maksimal bagi para warganya baik pada level kualitas maupun level kuantitas. Di dalam negara, manusia yang menjadi warganya harus dapat menikmati kehidupan yang aman dan tenteram, rohani dan jasmani.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa negara ideal adalah negara yang memanusiakan manusia. Dengan itu status itu, negara dalam gradasi persekutuan menempati jenjang yang paling tinggi. Di dalam dan lewat hidup bernegara, manusia dimampukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang semaksimal mungkin. Itu berarti bahwa di dalam negara, manusia seyogyanya dapat mencapai tingkat kebajikan yang tertinggi. Kebajikan tertinggi harus terlihat lewat moralitas yang terpuji karena hanya moralitas yang demikian itulah yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Moralitas adalah pemberi kualitas khas kelas manusia. Manusia yang benar-benar bermoral adalah yang benar-benar berkualitas. Manusia demikian senantiasa bersedia melakukan segala sesuatu yang terbaik dan yang mulia. Jadi, jelas bahwa negara memanusiakan manusia dan bukan semata-mata memberi tempat untuk didiami atau sekedar mempertemukan manusia dengan sesamanya untuk menjalin persahabatan. Bilamana dikatakan negara memanusiakan manusia, itu berarti negara ada dan terbentuk agar manusia dapat mencapai

kesempurnaan, yaitu kehidupan dalam tingkat kebajikan yang paling tinggi yang sesuai dengan kodratnya. Untuk memanusiaikan manusia, negara bukan sekedar melindungi setiap warganya dan bahaya yang mengancam mereka, tetapi agar setiap warganya dapat meraih kesejahteraan material, spiritual dan intelektual (Reale, 2004: 355-353).

Kerusakan Negara

Kerusakan pertama dalam sebuah negara yang ideal terjadi ketika kelas “yang memiliki roh” merampas kedudukan pemerintah dari para raja filsuf. Negara yang dihasilkan adalah suatu ‘timokrasi’ karena para pelindung mengambil alih kekuasaan untuk alasan yang salah, untuk ‘kehormatan’ (*time*) yang dihasilkannya, bukan karena mereka hendak mengimplementasikan keadilan. Dalam hal ini rasio ditundukkan pada ketamakan. Suatu negara militer muncul karena pengabaian sistem pendidikan Plato yang mulia, tidak mempunyai pemimpin yang terdidik secara filosofis. Model Platon mulai runtuh ketika para pemimpin menyerahkan pencarian mereka akan hikmat dan sebaliknya berusaha menumpuk harta kekayaan. Para pemimpin suatu negara timokratis tidak berpikir untuk mengejar kebajikan; mereka melayani masyarakat dengan berbagai motivasi. Meskipun tidak sepenuhnya menyerah kepada kekuatan hawa nafsu, para penguasa membiarkan ‘diri mereka yang memiliki roh’ berkuasa atas rasio. Prajurit menggantikan tempat filsuf sebagai pahlawan bagi warga negara.

Plato berbicara tentang merosotnya masyarakat dalam bagian empat dari *Republic*-nya. Negara-negara seperti apa yang dihasilkan ketika ketidakadilan dipraktekkan? Plato mengenal bagaimana ketidakadilan merusakkan baik masyarakat (makrokosmos) maupun individu (mikrokosmos). Ketidakadilan adalah suatu kekacauan atau tiadanya harmoni. Kapan saja salah satu kelas atau individu menolak penguasaan diri –kebajikan bagi ketiga kelas itu– keruntuhan masyarakat dimulai.

Meneropong kerusakan negara dalam perspektif Platon harus terlebih dahulu pada konsep tentang kekuasaan. Menurutnya, sumber kekuasaan itu bukan pangkat, kedudukan, jabatan, juga bukan harta milik dan kekayaan dan bukan pula dewa atau apa pun yang dianggap ilahi. Plato menobatkan filsafat atau ilmu pengetahuan identitas bagi yang menduduki tahta pemerintahan negara ideal karena pengetahuan adalah pembimbing dan penuntun manusia pada pengenalan akan kebenaran segala sesuatu yang ada dalam keberadaannya yang sempurna di dunia ide. Hanya

pengetahuanlah yang sanggup mengembalikan manusia ke dunia ide untuk mengenal kembali dengan sebaik mungkin apa yang dahulu pernah diketahuinya dengan sempurna. Jika pengetahuan menduduki tempat yang terutama dan memainkan peranan penting maka pada tempatnyalah apabila dikatakan bahwa pengetahuan merupakan sumber kekuasaan. Itulah sebabnya Plato mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan (*Republic*, IV: 441D-442d). Jika pengetahuan ditundukan oleh kekuasaan yang lain, maka di situ terdapat sumber kerusakan negara.

Lalu, bagaimana kerusakan negara di Indonesia? Konsep Indonesia sebagai sebuah *welfare state* sebenarnya sudah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. "...Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa..." Konsep ini begitu indah tetapi investasi Indonesia di bidang pendidikan masih sangat kurang bila dibandingkan Singapura, Thailand dan India. Masih banyak orang Indonesia yang tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Hal ini diperparah oleh model dunia pendidikan di Indonesia yang sama saja dengan dunia *multi level marketing*. Orang-orang yang ada di lapisan bawah menjadi kaki-kaki kekayaan dan kemakmuran bagi orang-orang di lapisan atas. Murid atau mahasiswa menjadi kaki-kaki kemakmuran para dosen atau guru. Walaupun saya percaya tidak semua pelaku pendidikan korup dan memeras anak didiknya.

Saya berpikir hal seperti ini karena bangsa ini (pemerintah kita) masih lebih memprioritaskan pembangunan fisik daripada pembangunan mental, dalam hal ini pendidikan dan kesehatan manusia Indonesia. Kita lihat saja di kota Jayapura dan kota lain di Indonesia. Setiap hari ada saja apartemen mewah dibangun. Setiap hari ada saja *mall* atau pusat pertokoan yang diperbaharui atau dibangun. Setiap hari ada saja pembangunan perumahan yang menjual kenyamanan dan kemewahan hidup bak Hollywood. Padahal kalau dipikir lebih jauh, konsumen rumah toko, pusat perbelanjaan, dan perumahan mewah itu hanya segelintir orang jika dibandingkan dengan manusia-manusia Indonesia yang membutuhkan dan berhak akan pendidikan yang layak dan berkualitas. Suatu saat pasar apartemen, pusat perbelanjaan, dan perumahan mewah itu akan jenuh, sebaliknya tidak akan pernah ada kejenuhan dalam dunia pendidikan.

Bentuk kelihatan dari kerusakan di atas berada dalam sistem politik oligarki. Oligarki, secara literal berarti "pemerintahan oleh sejumlah kecil orang,". Dalam model ini perpecahan sosial dapat dihasilkan. Pemerintahan



tidak dipimpin oleh para intelektual atau militer tetapi para kelas komersial. Di dalam oligarki rasio atau keberanian diganti dengan nafsu berkuasa yang menyatakan dirinya dalam keinginan akan kekayaan dan kemakmuran.

Contoh kerusakan karena watak oligarkis pemerintahan adalah Sparta yang korup. Kewarganegaraan didasarkan pada kepemilikan properti. Dalam masyarakat ini kekuasaan dipegang oleh yang memiliki kekayaan. Prioritas pertama di sini adalah melengserkan hikmat dan keberanian sebagai kebajikan-kebajikan negara yang utama. Ketertiban terus diturunkan ke bawah pemerintahan hawa nafsu. Akibatnya adalah kriminalitas, pengemisan, ketidakserasian dan perpecahan yang lebih besar muncul. Terjadi persaingan antara yang kaya dan miskin untuk merebut supremasi politik dalam negara.

Hal-hal ini dengan mudah dapat ditemukan contohnya di Indonesia. Di negeri ini, pedagang bisa menjadi politisi dan sebaliknya politisi bisa menjadi pedagang. Hal ini masih bukan merupakan persoalan karena ini merupakan bagian dari hak politik warga, walaupun tidak sesuai dengan sumpremasi kekuatan intelektual menurut Plato. Namun watak komersial politisi tidak bisa dihilangkan kalau yang menjadi pejabat politik adalah pebisnis. Contoh yang paling jelas adalah kekuasaan legislatif seringkali merupakan kendaraan untuk memperlancar urusan perdagangan. Politik kemudian dikendalikan oleh kekuatan dunia usaha. Semakin banyak pengusaha yang menjadi anggota DPR dan menteri. Bisa diperkirakan, mentalitas komersial akan banyak mewarnai kebijakan politik atau kebijakan pemerintah. Bahkan lebih jauh lagi prinsip perdagangan dapat mengatur orang-orang yang duduk di pemerintahan (*Kompas*, 26/10/1996). Misalnya, soal Wisma Atlet yang sedang dalam penyelidikan KPK. Menurut *Vivanews*, Sabtu, 13 Agustus 2011, nilai proyeknya adalah Rp 200 miliar. Yang sudah dialokasikan adalah Rp 16 miliar –Rp 9 miliar untuk DPR lewat Paul, dan Rp 7 miliar dialokasikan untuk tim kongres pemenangan Anas. Untuk Proyek Hambalang yang senilai Rp 1,2 triliun, dana yang sudah dialokasikan adalah Rp 100 miliar, dengan rician sebagai berikut: ke DPR kurang lebih Rp 30 miliar lewat pengusaha, teman Anas, yang bernama Mahfud, untuk memenangkan Anas dalam konggres adalah sebesar Rp 50 miliar, dan ke tim konsultan Anas yakni Ifang sebesar Rp 20 miliar.

Pemerintah dari masa ke masa membuat gerah perasaan masyarakat. Pelaksanaan *good governance* yang mengharapakan sinergi yang baik antara tiga komponen utama, yaitu negara, pelaku bisnis, dan *civil society* seakan hanya sekedar *pepesan* kosong. Pengusaha nasional yang masuk ke dalam kanc



perpolitikan dan menjalankan institusi politik bertujuan semata-mata demi kepentingan pribadi. Dominasi kalangan pengusaha dalam dunia politik memunculkan wacana baru yakni dwifungsi politisi-pengusaha. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara kebijakan pemberantasan KKN dengan realitas persenyawaan antara politisi dan penguasa. Politik yang dihasilkan melalui pemilihan umum tahun 2004 yang lalu yang benar-benar didominasi oleh politisi-pengusaha. Benih-benih KKN semakin subur sebagai akibat dari tindakan politisi-pengusaha. Hasil pemilu 2004 memperlihatkan dominasi politisi-pengusaha.

Banyak hal yang tidak etis karena adanya dwi-fungsi politisi-pengusaha. Misalnya: Pertama, aktivitas politik hanyalah kedok keuntungan (*profit oriented*) di mana besaran keuntungan ditentukan oleh investasi politik. Kedua, keputusan politik atau kebijakan nasional seringkali mengabaikan kepentingan konstituen dan dijalankan secara tidak konsisten. Ketiga, sikap oportunistik tampak dalam perpindahan partai yang mengindikasikan pencarian kemungkinan yang lebih menguntungkan. Keempat, politisi berperan juga sebagai makelar proyek yang dapat menghasilkan komisi yang besar.

Dalam politik, pemilu merupakan “pasar” yang mempertontonkan ‘perdagangan’ dari partai-partai politik untuk memperoleh suara rakyat sebanyak-banyaknya. Mirip seorang ibu rumah tangga yang sedang belanja di pasar, semakin banyak uang yang disiapkan untuk belanja semakin banyak suara yang dibelanjakan. Kekuatan-kekuatan politik Indonesia era reformasi berada pada tangan kaum konglomerat. Kekuasaan politik ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Seorang pemilik modal yang besar akan memiliki kekuasaan politik yang besar pula. Semakin kuat kekuasaan politik seseorang semakin mulusnya urusan bisnis pribadi. *Kompas* menurunkan berita bahwa rekam jejak mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di sejumlah tender proyek pemerintah yang mencurigakan menyiratkan potensi perselingkuhan antara kepentingan politik dan bisnis. Kerawanan ini adalah akibat dari kenyataan banyaknya politisi Indonesia berlatar belakang pengusaha. Sebagai politisi, para pengusaha memiliki akses yang sangat besar ke sejumlah pihak yang dapat melapangkan urusan bisnis mereka. Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan mengatakan, lazimnya para pengusaha tersebut tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri tetapi juga kerap dijadikan mesin penghasil uang bagi partai politik pengusungnya. "Ada uang yang dibagi antara dia dan elite partai. Konsekuensinya partai memberikan keleluasaan" (7 Juli 2011).



Suara rakyat merupakan hal yang dicari baik oleh partai politik maupun oleh calon anggota legislatif dan eksekutif. Suara rakyat dianggap sebagai komoditas yang “diperjualkan” dan siap dibeli oleh calon yang disebut di atas secara terang-terangan atau tertutup. Perebutan suara “di pasar politik” dalam era demokrasi liberal menggunakan banyak media, seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Apa yang dicitrakan mereka adalah kepribadian dan kepemimpinan yang penuh dengan kearifan, solidaritas, kecerdasan. Mereka juga tahu memanfaatkan cita rasa religius masyarakat dengan menampilkan diri sebagai orang yang saleh lewat penggunaan istilah-istilah keagamaan dalam kampanye.

Partai politik, capres, cawapres dan caleg berkelakuan bak iklan kecap. Diri diiklankan seperti kecap. Mengapa? Semua kecap itu pasti “nomor satu”. Walaupun hasil politisi ala iklan kecap akan berbeda. Partai-partai politik nyaris tak ada bedanya dengan perusahaan-perusahaan di mana politisi merupakan “barang jualan” dan sekaligus sebagai *sales* untuk menjual “barang-barang” mereka kepada masyarakat. Mereka menggunakan media massa untuk mempopulerkan partai atau politisinya. Pengulangan yang dilakukan secara terus menerus dan besar-besaran oleh iklan di media massa akan membuat masyarakat pemilih “terkondisikan”. Secara psikologis iklan-iklan tersebut bisa mempengaruhi massa yang tidak kritis.

Politik menjadi panggung sandiwara. Partai dan pemimpin terbaik disandiwarkan sedemikian rupa seolah-olah seperti realitas yang sesungguhnya. Akibatnya, masyarakat sukar untuk mengenali secara utuh para calon anggota legislatif atau pemimpin politik. Menjadi artis dan politisi pada “hakikatnya sama” yakni membikin sensasi bahkan dengan cara murahan untuk menjadi populer atau mendapat perhatian publik.

Pertautan dwifungsi politik dan ekonomi melebar juga ke dalam dunia militer. Di sini terdapat dwifungsi keamanan dan ekonomi. Di Indonesia, militer bukan hanya penjaga keamanan tetapi juga pebisnis. Ada dua istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan kondisi ini, yaitu ‘bisnis keamanan’ dan ‘keamanan bisnis’. Yang pertama yang kerap digosipkan masyarakat yaitu pihak keamanan ‘sengaja’ membikin keonaran yang mengharuskan solusi proyek. Artinya perlu ada proyek solusi kekacauan. Sebagai proyek, kucuran dana adalah suatu keharusan. Yang kedua berkaitan dengan pengamanan bisnis-bisnis besar yang dijalankan swasta. *Security* swasta didukung oleh *security* negara yang mengharuskan pengertian pembayaran uang keamanan. Karena dibiayai oleh pengusaha, konflik pekerja atau masyarakat dengan penguasaha bisa dihadapi secara



militeristik. Selain dua hal di atas, masyarakat mengetahui berbagai bisnis langsung dari pihak keamanan. Semua hal ini jelas menakutkan masyarakat, dan secara kritis mereka bertanya: Apakah negara Indonesia tidak mampu lagi mendanai mereka sehingga mereka harus berbisnis untuk membiayai diri sendiri?

Undang-undang tahun 2004 melarang kegiatan komersial militer dan meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil-alih seluruh bisnis militer. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta pihak keamanan untuk mematuhi undang-undang tersebut dan mengakhiri bisnis-bisnis militer, namun tim antar-instansi yang dibentuk untuk menyusun rencana pengambilalihan bisnis-bisnis militer tidak menunjukkan hasil yang memuaskan sejak pembentukannya pada tahun 2005.

Dwifungsi tugas non ekonomi dan kepentingan ekonomi merupakan lahan subur bagi praktek korupsi. Korupsi adalah salah satu catatan negatif sistem demokratis,⁹⁷ karena korupsi itu sekaligus mengkhianati prinsip-prinsip moral dan norma keadilan sosial. Korupsi merusak tatanan sebuah negara lewat pengaruh negatif atas hubungan antara rakyat dan pemerintah; korupsi menyebabkan sikap skeptis rakyat terhadap lembaga politik dan akhirnya melahirkan apatisme warga negara terhadap politik dan proses-prosesnya, yang pada akhirnya dapat memperlemah institusi politik. Korupsi merongrong lembaga politik, karena ia menjadikan lembaga politik sebagai ranah transaksi antara tuntutan para tukang lobi dan pemerintah. Dengan cara ini keputusan politik dapat hanya menguntungkan dan memenuhi tujuan terbatas dari orang-orang yang memiliki kekuatan guna mempengaruhi keputusan politik. Akhirnya hal ini dapat menghalangi terlaksananya kesejahteraan umum yang merupakan tujuan didirikan lembaga politik negara.

Pemberantasan korupsi mensyaratkan adanya kesadaran tentang nilai-nilai demokratis. "Perampasan" harta negara dan masyarakat dalam memiliki kaitan erat dengan rendahnya pengembangan demokrasi yang substansial. Demokrasi yang berjalan di negeri kita lebih bersifat prosedural. Yang dipentingkan adalah terlaksananya berbagai proses demokrasi tanpa melihat apakah tujuan utama 'dari, oleh, untuk dan demi' rakyat terwujud. . Demokrasi masih dijadikan alat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk meneguhkan *status quo*. Tanggung jawab atas dosa-dosa sosial yang lambat laun menggerogoti keabsahan negara dan legitimasi pemerintahan dilakukan

⁹⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* 44 dan *Centesimus Annus* 48



lewat media dan hukum yang telah "dijinakkan" dan retorika keadilan. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk melibatkan diri atau berpartisipasi dalam mengontrol proses pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Masyarakat terbentur pada formalisme *rigid* yang sudah diberi label demokrasi dan akan masuk ke labirin yang sangat kompleks. Artinya, lembaga-lembaga demokrasi formal baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif beserta segala bentuk derivasinya, belum sepenuhnya dapat merealisasikan makna dan hakikat demokrasi yang substantif.

Kenyataan-kenyataan di atas merupakan lubang hitam demokrasi Indonesia. Lubang hitam ini menyebabkan demokrasi Indonesia berada dalam implementasi yang sangat rendah dan sekadar berjalan di atas permukaan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dan lain-lainnya menjadi sangat lemah. Kondisi itu, sekali lagi, memberi peluang besar bagi menguatnya korupsi dan penyimpangan lain.

Dalam konteks itu, demokrasi mensyaratkan secara mutlak adanya keterbukaan. Pemerintahan yang demokratis seharusnya merupakan pemerintahan yang terbuka dan transparan secara luas, serta memiliki nilai-nilai pertanggungjawaban dan partisipasi yang juga demokratis. Keterbukaan dan pertanggungjawaban sebagai nilai-nilai inti demokrasi mengindikasikan secara kuat bahwa demokrasi substansial senyatanya merupakan nilai-nilai moral yang substansial. Demokrasi sejati identik dengan komitmen penegakan moral.

Pemimpin yang tidak demokratis dengan gampang menjadi tirani. Ia menjadi seperti seorang jawara. Warga memberikan ketaatan yang buta karena pemimpin adalah seperti serigala. Rakyat diperbudak. Perang antara bangsa diprovokasi untuk mengalihkan perhatian dan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Kritik, protes dan pemberontakan dieliminasi secara kejam. Tirani menghasilkan ketiadaan hukum dan kejahatan. Karena tiadanya kebajikan, ketidakadilan menjadi merajalela, dan negara menjadi kekurangan dalam segala kebaikan.

Selain tirani kepemimpinan terdapat tirani sosial dalam bentuk dikotomi mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas dapat memaksakan kebijakan politik yang memihak kepentingan mereka atau kelompok minoritas yang kuat mendorong proses politik yang memihak mereka. Hal ini jelas menodai demokrasi, pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat.

Selain dua model tirani di atas, dalam dunia demokrasi terdapat tirani ekonomi. Tirani ini tampak dalam kebijakan yang salah tentang

kekayaan alam. Kekayaan alam dikuasai dengan kelicikan oleh segelintir kapitalis asing. Ironisnya Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah lebih banyak dinikmati justru oleh negara lain. Padahal konstitusi bangsa ini jelas menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Namun kekayaan alam Indonesia kini sudah bukan lagi milik rakyat, karena swasta asinglah⁹⁸ yang kini mendominasi bahkan memonopolinya. Berdasarkan data Neraca Energi 2009 dari 346 juta barrel minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri, 38% diekspor ke negara lain. Namun pada saat yang sama Indonesia harus mengimpor minyak mentah 129 juta BOE, atau 35% dari total produksi dalam negeri. Penyebabnya adalah 85 persen produksi minyak Indonesia dikuasai oleh swasta termasuk asing. Tambahan lagi harga minyak terus dinaikkan sesuai dengan harga internasional yang menyebabkan kesengsaraan rakyat kecil.

Industri tambang Indonesia (gold, coal, nickel dan lain-lain) saat ini dikuasai juga oleh perusahaan-perusahaan asing yang biasa dikenal dengan sebutan *the big four*: Freeport Indonesia, Newmont Indonesia, International Nickel Indonesia (INCO) dan Kaltim Prima Coal (KPC). Keempat perusahaan ini mengeruk hasil bumi Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Freeport Indonesia sejak 1973 telah mengeksploitasi secara besar tanah Papua. Freeport memulai pertambangan terbuka di Ersberg, kawasan ini selesai ditambang pada tahun 1980-an dan menyisakan lubang sedalam 360 meter. Kemudian Pada tahun 1988, Freeport mulai mengeruk cadangan raksasa lainnya, Grasberg, yang masih berlangsung sampai saat ini. Dari eksploitasi kedua wilayah ini, sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724, 7 juta ton emas telah mereka keruk. Pada bulan Juli 2005, lubang tambang Grasberg telah mencapai diameter 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan kedalaman 800 m. Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga, dan 1.430 ton cadangan emas yang tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041. Selama seperempat abad, kekayaan Indonesia yang sudah dibawa keluar negeri kurang lebih 1620 ton emas, 3420 ton perak, dan 162 juta ton tembaga. Sekian ton emas itu kalau dirupiahkan dengan harga sekarang bernilai lebih dari 400 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis jika dialokasikan sebagiannya untuk program pengentasan kemiskinan.

⁹⁸ Jumlah yang dikeruk diperkirakan berkisar antara Rp 2.000 - 3.000 trilyun/tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dari jumlah kerugian negara akibat korupsi yang berjumlah 400 trilyun/tahun.



Para petinggi Freeport mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta-merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Negara pun mengalami kerugian karena keuntungan Freeport yang masuk ke kas negara sangatlah kecil jika dibandingkan keuntungan total yang dinikmati Freeport. Setiap orang pasti akan menilai betapa bodohnya perjanjian yang disepakati oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini dengan korporasi-korporasi asing tersebut. Bangsa kita yang notabene adalah tuan rumah sudah puas hanya dengan bagian yang sangat kecil. Tidakkah kita sadar bangsa ini sudah dikanggangi secara terang-terangan oleh kapitalisme korporasi asing tersebut (*Kompasiana*, 25/10/11)

Bagaimana hal-hal di atas ditempatkan dalam pemikiran ideal negara Plato. Gagasan Plato untuk menciptakan suatu negara ideal, tidak lain dari suatu negara yang bebas dan para penguasa dan para pemimpin yang rakus dan jahat. Dalam negara ideal Plato, manusia harus hidup dengan moralitas yang baik dan terpuji. Apalagi penguasa dan pemerintah bukan saja harus memiliki keempat kebajikan pokok yang mengendalikan dan yang menuntun ketiga bagian jiwa yang sebenarnya merupakan karakter dan sifat-sifat dasar dari moralitas yang baik dan terpuji itu, tetapi mereka juga harus memiliki segala macam ilmu pengetahuan dan sanggup berfikir secara filsafati yang akan memungkinkan jiwa meningkat ke dunia ide dan yang akan membawa mereka ke dalam pemahaman akan hakikat dan segala sesuatu yang ada. Hanya orang-orang yang sanggup berfikir secara filsafati yang dapat disebut arif dan bijaksana dan hanya kepada orang-orang yang demikian itulah yang dapat dipercayakan segala macam urusan pemerintahan.

Untuk mewujudkan keadilan, masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, rakyat adalah rakyat dan penguasa adalah penguasa. Tugas ini adalah tugas negara. Dari sini keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis yakni kualitas atau fungsi sebagai makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena itu Plato



mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.⁹⁹

Jadi negara yang baik menurut Plato adalah negara yang berpengetahuan yang dipimpin oleh orang yang bijak. Negara yang bijak adalah yang dipimpin oleh rezim aristokrat. Aristokrasi menakar aristokratnya berdasarkan kualitas. Pemerintah mesti merupakan putera terbaik dan terbijak dalam negeri itu. Penguasa dipilih bukan lewat pungutan suara penduduk melainkan lewat proses keputusan bersama. Yang telah menjadi penguasa harus menambah jumlah aristocrat, yang semata-mata ditakar berdasarkan pertimbangan kualitas.

Pemimpin dari sistem aristokrasi adalah filsuf raja, artinya raja yang berpengetahuan. Filsuf-raja harus memiliki pengetahuan hukum namun ia tidak tunduk kepada hukum. Hukum memang baik bagi yang diperintah sejauh ia dinilai baik oleh filsuf. Tetapi filsuf itu sendiri tidak boleh diikat dan dibelenggu oleh hukum dan undang-undang. Karena filsuf adalah orang bijaksana yang memiliki moralitas dan pengetahuan yang tinggi, tidaklah beralasan bagi seseorang untuk merasa khawatir bahwa pada suatu saat si filsuf akan menyalahgunakan kebebasannya terhadap hukum. Itulah sebabnya di dalam *Republic* tidak nampak adanya upaya Plato untuk menyusun undang-undang tertulis. Bagi Plato, si filsuf-raja adalah yang harus mengambil keputusan dan menetapkan segala kebijaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan dalam situasi tertentu atas dasar kemampuannya untuk berpikir secara filsafati, dan oleh sebab itu ia pulalah yang paling mengetahui tentang apa yang baik yang harus dilakukan oleh semua orang dan apa yang buruk yang harus dihindari (Rapar, 1991: 89).

Politik Ideal Negara Menurut Plato

Politik ideal bagi negara adalah politik yang berpanglimakan rasio. Rasio sesungguhnya sudah mencukupi bagi keadaan ideal suatu negara. Namun rasio kerap tidak diarahkan menuju ufuknya yakni kebijaksanaan. Dengan belajar dari Mencius yang secara khusus berbicara tentang politik yang

⁹⁹ Gagasan filsuf-raja merupakan jalan keluar yang ditawarkan Plato untuk mengatasi situasi yang semakin memburuk dalam pemerintahan negara-negara yang ada pada masa itu. Konsekuensi gagasan filsuf-raja itu ialah bahwa dalam negara ideal, para penguasa harus berani meninggalkan adat-istiadat dan pendapat umum. Filsuf-raja sebagai orang bijaksana yang memiliki segala pengetahuan akan memerintah berdasarkan pengetahuan dan bukan berdasarkan adat-istiadat dan kebiasaan. Filsuf-raja tidak akan memerintah demi kepentingan pribadi dan kepentingan kelas penguasa.

bijaksana, pada bentuk negara ideal kami menambahkan pembahasan tentang politik yang bijaksana. Di bawah ini akan dibahas dua hal ini.

Politik Rasional

Baik dan buruknya manusia, menurut Plato, ditentukan oleh akalunya. Orang baik adalah orang yang dikuasai oleh akal budi, sedangkan orang jahat adalah orang yang dikuasai oleh nafsu. Selama manusia dikuasai oleh nafsu dan emosi, manusia dikuasai oleh sesuatu yang di luar dirinya, yang bersifat irasional. Bila manusia dikuasai oleh nafsunya, hidup menjadi tidak menentu, tidak teratur dan menjadi kacau-balau. Manusia yang demikian adalah manusia yang tidak memiliki keutuhan, yang terpecah belah, tergantung pada nafsu atau emosi mana yang sedang mengemudikannya. Dalam hal ini manusia tidak lagi menjadi subjek atas dirinya, tidak memiliki dirinya lagi karena menjadi objek dari dorongan-dorongan irasional dalam dirinya. Sebaliknya, manusia yang dikuasai oleh akal budi, dapat menguasai dirinya sendiri, berpusat pada diri sendiri, dan utuh. Hidup secara rasional berarti bersatu dengan dirinya sendiri. Orang itu menikmati ketenangan dan mantap dalam dirinya sendiri. Dengan demikian manusia yang menguasai dirinya sendiri melalui akal budi menikmati tiga hal yaitu kesatuan dengan diri sendiri, ketenangan, dan pemilik diri yang tenang (Magniz, 1997: 20).

Konsekuensi logisnya ialah bahwa jika manusia ingin mencapai suatu hidup yang baik, tenang, bersatu, bernilai maka hal pertama yang perlu diusahakan adalah membebaskan diri dari kekuasaan irasional hawa nafsu dan emosi serta mengarahkan diri kepada akal budi. Bagi Plato orang yang mengikuti akal budi adalah orang yang berorientasi kepada realitas yang sebenarnya. Akal budi adalah kemampuan untuk melihat dan mengerti. Orang berakal budi dikuasai oleh pengertian yang tepat. Pengertian tepat itu tercermin pada keteraturan dalam jiwa. Melalui akal budi, manusia menyesuaikan diri dengan keselarasan alam semesta, dengan alam idea-idea. Akal membantu manusia untuk membedakan pelbagai dorongan dan kegiatan, membedakan antara keinginan yang perlu dan yang tidak perlu. Akal budi membawa manusia pada tatanan yang tepat, suatu yang ditata oleh intuisi.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu diadakan pendidikan yang diatur oleh negara. Menurut Plato, anak usia 10 tahun ke atas diuruskan negara. Dasar utama pendidikan anak-anak adalah *gymnastic* (senam) dan musik, selain diberikan pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Senam dianggap dapat menyehatkan badan dan

Sejalan dengan pandangannya bahwa negara merefleksikan karakter para warga negara, poin Plato yang utama adalah bahwa negara-negara timokratis, oligarkis, demokratis, dan tirani muncul ketika para warga negara merusakkan ideal keadilan. Plato percaya bahwa negara mencerminkan karakter orang-orang yang paling dominan. Pemerintah merosot ketika kekuasaan secara gradual lepas dari tangan orang-orang bijak dan dipegang oleh orang-orang yang menurut naturnya *inferior*.

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan berada di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipil yang harus dipertahankan, yaitu pemilahan kelas-kelas yang tegas. Misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Dari elemen-elemen prinsipil ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, seperti berikut ini: kelas penguasa memonopoli semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan berhak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan, Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan. Negara harus bertujuan pada *autarki* ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

pikiran, maka tak heran tidak lama kemudian muncul pepatah latin yakni *mensana incorpore sanno*. Untuk umur 14-16 tahun anak diajarkan bermain musik, puisi serta mengarang untuk menanamkan jiwa yang halus, budi yang halus dengan menjauhkan lagu-lagu yang melemahkan jiwa serta mudah menimbulkan nafsu buruk. Usia 16-18 tahun diberikan pelajaran matematika untuk membimbing jalan pikiran, selain diajarkan dasar-dasar agama serta adab kesopanan, karena negara atau bangsa tidak akan kuat jika tidak percaya terhadap Tuhan. Pada umur 20 tahun diadakan seleksi yang lebih tinggi untuk mengikuti pendidikan mengenai adanya idea (ide) dan dialektika, dan mereka mendapat kesempatan untuk memangku jabatan yang lebih tinggi.



Politik yang rasional telah berkembang dalam sejarah peradaban manusia. Orang-orang Yunani Kuno pasca Sokrates menggunakan rasionya untuk membebaskan diri dari mitos-mitos dan tahayul-tahayul yang membelenggu. Rasio memungkinkan hidup secara etis dapat membedakan mana yang baik dari yang buruk. Kemampuan yang unik manusia ini mendapat pembenaran dalam pandangan Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk rasional (*animal rationale*). Rasio yang membedakan manusia dari binatang. Perbedaan seperti ini jelas bernada optimistis terhadap peran rasio pada manusia. Dengan rasionya manusia mampu mengatasi dorong instingtualnya.

Pentingnya rasio melahirkan kajian khusus tentangnya dalam pemikiran Whitehead. Menurut Whitehead rasio manusia memiliki fungsi praktis dan spekulatif (2001: 33-94). Manusia memanfaatkan akal budi praktisnya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang sifatnya praktis yang dihadapi sehari-hari. Manusia senantiasa mengembangkan kemampuan rasional untuk menciptakan kebudayaannya. Daya pendorong atau pemicu dari adanya akal budi praktis adalah masalah-masalah konkret yang dihadapi manusia sehari-hari. Adapun akal budi spekulatif memungkinkan manusia untuk membebaskan diri dari kungkungan strategi, metode, cara kerja, teknologi, manipulasi rasio dan sebagainya yang sifatnya praktis, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya demi tujuan pada dirinya sendiri. Dengan rasio spekulatif manusia tidak hanya memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapinya, tetapi juga menjawab pertanyaan tentang mengapa ia peduli pada persoalan tersebut.

Fungsi rasio manusia menjadi sangat relevan ketika kita berhadapan dengan budaya hidup yang sangat menekankan pada dimensi praktikalitas dan kepentingan sesaat. Dalam konteks politik, tidak jarang kita berhadapan dengan “mental” hidup seperti ini. Para politisi di negeri ini lebih banyak berpikir secara sangat pragmatis, misalnya bagaimana memenangkan pemilihan umum daripada memikirkan upaya untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Rasio praktis bergelut dengan strategi, disiplin dan kemahiran, mengenai bagaimana memanfaatkan peluang untuk memenangkan kepentingan kita. Sementara rasio spekulatif lebih dingin, lamban, mengambil jarak, berpikir secara menyeluruh, mempertimbangkan seluruh aspek dalam keutuhannya dan tidak ingin merugikan kelompok tertentu secara tidak adil. Jelas rasio praktis lebih laku dijual dalam dunia politik dibandingkan dengan rasio spekulatif. Memisahkan rasio praktis dari rasio



spekulatif atau sebaliknya harus dikatakan sebagai hal tidak bijaksana. Dalam suatu lembaga politik seperti DPR harus ada keseimbangan antara anggota DPR non akademis (rasio praktis) dan anggota DPR yang berasal dari dunia akademis (rasio spekulatif). Bila dalam politik kita mementingkan hanya salah satu fungsi rasio saja, maka kita tidak hanya mentolerir sebuah praktik kekuasaan yang sewenang-wenang (tiranis), tetapi juga praktik kekuasaan yang sama sekali tidak rasional.

Rasio praktis maupun spekulatif perlu menjadi sebuah cara hidup (*a way of life*). Sebagai cara hidup, rasio harus meresapi berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari, entah di bidang politik, ekonomi dan akademis atau pun kehidupan biasa lainnya. Rasio praktis akan membuat rasio spekulatif tidak menjadi prinsip-prinsip abstrak tanpa makna dengan kehidupan praktis manusia. Sementara rasio spekulatif membebaskan rasio praktis dari metode-metode dan strategi-strategi pengambilan keputusan yang merugikan kepentingan orang lain, bahkan kaum minoritas sekalipun. Rasio praktis mendekatkan rasio spekulatif pada kehidupan real masyarakat, sementara rasio spekulatif memungkinkan manusia untuk berpikir secara lebih luas dan mendalam. Hanya melalui rasio teoretislah kita mampu berjumpa dengan nilai-nilai moral. Memihak hanya pada rasio praktis pasti membuat kita bersikap pragmatis, mementingkan hal-hal praktis, dapat diukur dan mendukung kepentingan jangka pendek. Sebaliknya, memihak hanya pada rasio spekulatif akan membuat kita menjadi para pemikir yang tidak membumi dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Pembedahan fungsi rasio dapat membantu orang untuk menentukan pilihan politis dalam pemilihan umum. Pilihannya bisa dikatakan rasional jika pilihan yang tersedia bervariasi. Tanpa variasi dari pilihan yang tersedia, sulit untuk mengatakan bahwa keputusan atau pilihan pemilih bersifat rasional. Paling tidak ada dua alasan, mengapa pemilih yang rasional penting untuk demokrasi (Sindung Tjahyadi, 2003). Pertama, pemilih rasional akan mendorong parpol mengajukan calon yang bukan hanya populer, tapi juga berkualitas. Ke depan, hal ini akan mendorong kaderisasi politik yang lebih baik. Parpol yang tidak berhasil menghasilkan dan mengajukan calon yang berkualitas akan kehilangan dukungan dari pemilih rasional.

Kedua, pemilih rasional akan membuat demokrasi menjadi transformatif. Selama ini, demokrasi di Indonesia hanya berfungsi sebagai proses agregasi preferensi dan aspirasi publik. Demokrasi di Indonesia belum mampu mentransformasi preferensi dan aspirasi elite. Pemilih yang



rasional akan menolak elite yang hanya mengandalkan popularitas dan yang tidak mampu menampung dan menjawab aspirasi mereka.

Ada dua kemungkinan rasional pemilih. Pertama, pemilih tidak menentukan pilihannya berdasarkan rasio karena mereka memilih bukan berdasarkan perbedaan calon. Kedua, pemilih memilih dalam *bounded rationality* atau dengan modal pengetahuan yang (sangat) terbatas mengenai pilihan yang ada. Jadi, pilihan yang dijatuhkan pada satu calon bukan karena pertimbangan rasional, tapi didasarkan pada kekurangtahuan tentang perbedaan antara calon.

Pemilih rasional akan memilih calon yang bukan hanya dikenal melainkan juga berkualitas, karena calon yang berkualitas dan bukan calon yang populer yang akan memberikan keuntungan buat pemilih. Tanpa kapabilitas dan kapasitas yang tinggi, hampir tidak mungkin calon mampu membawa keuntungan buat pemilihnya.

Public choice selalu menekankan penilaian keputusan-keputusan rasional baik oleh individu maupun masyarakat atau keputusan pemerintah. Oleh karenanya, konsep tentang pilihan publik selalu bersinggungan dengan teori tentang pilihan rasional. Bagi teori pilihan rasional, kebijakan publik adalah hasil interaksi politik di antara pelaku rasional yang ingin memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Politik, dengan demikian, dianggap sebagai sebuah panggung, tempat pihak bersaing untuk mengeruk berbagai sumber yang ada di arena publik. Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.

Asumsi rasionalitas merupakan anggapan bahwa manusia akan melakukan sesuatu secara rasional, yang tidak memberikan kerugian pada dirinya sendiri. Dengan kata lain manusia akan bersifat rasional dalam menentukan semua hal yang dapat bermanfaat untuk diri pribadinya. Seperti dalam ilmu ekonomi terdapat prinsip memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan serendah-rendahnya. Rasionalitas dapat juga diartikan sebagai suatu pengambilan keputusan yang paling disukai. Prinsip ekonomi tersebut juga diterapkan manusia dalam kehidupan politik. Politik berkaitan erat dengan kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang tertentu yang menggerakkan roda pemerintahan. Implementasi penerapan rasionalitas ini terdapat pada waktu pemilihan umum yang akan menentukan siapa yang akan memegang jabatan tertentu dalam suatu pemerintahan. Pejabat yang memiliki kekuasaan, kewibawaan, kekayaan

mungkin akan berpeluang untuk dipilih rakyatnya. Hal ini tergantung dari rasionalitas yang dipakai oleh para pemilih.

Pemilihan Kepala Daerah dilakukan pada dasarnya adalah untuk menjangkau aspirasi masyarakat daerah dan mewujudkan suatu sistem pemerintahan lokal yang demokratis. Pelaksanaan pilkada saat ini bersifat langsung. Masyarakat sebagai pemilih diberi hak untuk memberikan suaranya kepada calon kepala daerah yang sesuai dengan keinginan mereka. Pemilih dikatakan rasional bila memilih mempergunakan informasi yang cukup untuk memilih calon yang ada. Rasionalitas pemilih sangat dipengaruhi keterjangkauan informasi yang mereka dapatkan. *Public figure*, seperti artis tentu memiliki tingkat ketenaran dan popularitas yang tinggi di mata masyarakat. Dede Yusuf yang seorang artis tentu memiliki popularitas dan lebih dikenal kebanyakan masyarakat Jawa barat sehingga ia dapat memenangkan pilkada tersebut. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencalonan artis sebagai kepala daerah mempengaruhi rasionalitas pemilih.

Politik Kebijaksanaan

Apakah politik rasional mencukupi? Politik rasional mencukupi namun pelaksanaan fungsi rasio secara seimbang perlu dipertegas dengan tujuan rasio adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pertimbangan yang tidak hanya bersifat kalkulus tetapi pertimbangan yang memperhitungkan baik rasio, kehendak dan seluruh diri.

Dalam filsafat politik konfusianis dikatakan bahwa hanya seorang yang bijaksana yang dapat menjadi seorang raja yang sesungguhnya. Mencius, filsuf Cina, mengatakan bahwa jika seorang penguasa tidak memiliki kualitas moral yang membuatnya menjadi pemimpin yang baik, maka rakyat memiliki hak secara moral untuk mengadakan revolusi. Baginya membunuh penguasa yang tidak bermoral bukan suatu tindakan kriminal. Jika seorang penguasa tidak bertindak sebagaimana seharusnya ia bertindak, maka secara moral ia tidak lagi menjadi seorang penguasa. Mencius membagi prioritas politik sosial sebagai berikut: “Rakyat adalah unsur yang sangat penting (dalam negara); kecintaan pada tanah dan hasil pertanian adalah yang kedua; dan penguasa adalah yang terakhir” (Fung, 1966: 73-74).

Jika seorang bijaksana menjadi raja, pemerintahannya disebut suatu pemerintahan ala raja. Menurut Mencius, ada dua jenis pemerintahan: yang satu adalah pemerintahan *wang* atau raja (bijaksana); yang lain adalah pemerintahan *pa* atau penguasa militer. Keduanya sangat berbeda.



Pemerintahan di bawah seorang raja yang bijaksana dilaksanakan lewat instruksi dan pendidikan moral; sedangkan pemerintahan di bawah penguasa militer dilaksanakan lewat kekerasan dan paksaan. Kekuasaan pemerintahan *wang* adalah kekuasaan moral, sedangkan kekuasaan pemerintahan *pa* adalah kekuasaan jasmani. Mencius mengatakan, “Orang yang menggunakan kekerasan menggantikan kebajikan adalah seorang *pa*. Orang yang berbudi luhur dan mempraktikkan rasa kemanusiaan adalah seorang *wang*. Ketika seseorang menundukkan rakyat dengan kekerasan, mereka tidak tunduk kepadanya dalam hati mereka tetapi hanya lahiriahnya saja, karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Tetapi ketika seseorang memperoleh pengikutnya lewat kebajikan, maka mereka akan rela hati dan patuh. Perbedaan antara *wang* dan *pa* ini selalu dipertahankan oleh para filsuf politik Cina. Dalam kaitannya dengan politik kontemporer, kita bisa mengatakan bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan *wang*, karena menggambarkan asosiasi orang-orang bebas, sedangkan pemerintahan fasis adalah pemerintahan *pa*, karena pemerintahan ini memerintah dengan teror dan kekerasan fisik (Fung, 1966: 74).

Pemerintahan ala raja bijaksana mengerjakan semua yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan dan keuntungan orang banyak. Kekuasaan raja menjadi lebih sempurna bila setiap orang telah menerima sejumlah pendidikan sehingga mereka dapat memahami hubungan-hubungan manusiawi. Pengamalan jalan raja ini bukanlah sesuatu yang asing bagi sifat dasar manusia, tetapi merupakan akibat langsung pengembangan oleh raja-bijaksana yang dalam dirinya terdapat “perasaan simpati”. Sebagaimana Mencius berkata: “Semua manusia mempunyai hati yang tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Raja-raja dahulu, karena memiliki hati yang tidak tahan ini, memiliki pemerintahan yang tidak semena-mena”. “Ketidaktahanan hati” dan perasaan simpati adalah satu menurut pemikiran Mencius. Seperti yang telah kita lihat, kebajikan pada rasa kemanusiaan, menurut para penganut konfusianisme, adalah perkembangan rasa simpati. Perasaan ini tidak dapat dikembangkan kecuali dengan mengamalkan cinta. Mengamalkan cinta tiada lain daripada “perluasan lingkup aktivitas seseorang sehingga mencakup orang-orang lain”, yang merupakan jalan *chung* dan *shu* (Fung, 1966: 75-76).

Mencius mengekspresikan konsepnya ini dengan jelas. Ia mengatakan, “Dia yang telah mengembangkan jiwanya dengan sempurna, mengetahui sifat dasarnya. Dia yang mengetahui sifat dasarnya, mengetahui Langit”. Jiwa di sini mengacu kepada “hati yang tak tahan” atau “perasaan simpati”. Inilah esensi sifat dasar manusia. Ketika kita mengembangkan jiwa



ini secara penuh, kita mengetahui sifat dasar kita yaitu "apa yang telah diberikan Langit kepada kita". Oleh karena itu, ketika kita mengetahui sifat dasar kita, kita juga tahu tentang Langit (Fung, 1966: 76).

Penutup

Teleskop "Negara Ideal Plato" menemukan bahwa negara Indonesia secara formil historis tidak pernah berbentuk oligarkhi dan tirani namun prakteknya membenarkan adanya oligarki dan tirani. Hal ini dapat dilihat dari perilaku pemimpin tertentu dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara. Akibatnya Indonesia memperlihatkan lubang hitam demokrasi yang besar yang menggambarkan kehidupan politik yang belum sempurna. Demokrasi Indonesia lebih cocok disebut "demo-crazy".

Banyak orang mengangani keindahan, keamanan dan kesejahteraan negara yang berbentuk aristokratik, suatu negara yang diperintah orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi, bijaksana dan memiliki pengetahuan yang memadai. Untuk mewujudkan suatu negara ideal seperti yang ada pada dunia Plato maka negeri Indonesia perlu memberikan perhatian pada pendidikan secara lebih besar misalnya dengan menambah anggaran pendidikan serta mengontrol penggunaannya secara ketat. Pendidikan amat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara akan menjadi baik apabila diperintah oleh orang cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal, yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.

Menjadikan Indonesia sebagai negara ideal yang menjamin keamanan, ketentraman dan kesejahteraan rakyat sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945, masih perlu diperjuangkan. Mengingat bahwa negara yang ideal adalah suatu hasil yang akan tercapai, maka yang diperlukan sekarang bukan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara ideal tetapi bagaimana mencerdaskan putera-puteri Indonesia untuk menjadi pemimpin yang memiliki integritas moral dan bijaksana. Tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan yang terakhir ini selain, sekali lagi, melipatgandakan perhatian dan kerja di bidang pendidikan.





Daftar Rujukan

- Fung Yu Lan. 1966. *A Short History of Chinese Philosophy*, A Free Press Paperback.
- Giovanni Reale. 2004. *Storia della Filosofia Greca e Romana*, Milano: Bompiani.
- Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* 75.
- Krant, Ricard, 1992. *The Cambridge Companion to Plato*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Plato, *Republica*, diterjemahkan oleh G. M.A. Grube, Rev. C.D.C. Reeve (ed), London: Hackett Publishing company.
- Rapar, Hendrik. 1991. *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawalipress.
- Sindung, Tjahyadi. 2003. *Teori Kritis Jurgen Habermas: Asumsi-asumsi Dasar Menuju Metodologi Kritik Sosial*, Jurnal Filsafat, Agustus 2003, Jilid 34, Nomor 2
- Suseno, Frans Magniz. 1997. *13 Tokoh Etika*, Yogyakarta: Kanisius.
- Whitehead, Alfred North. 2001. *Fungsi Rasio*, Terj. A. Nugroho, Yogyakarta: Kanisius.
- Yohanes Paulus II, *Centesimus Annus* 48.
- Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* 44.

